



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN

SEMESTER I
BULAN JANUARI S/D JUNI 2019

Pengadilan Negeri Pekalongan
Jalan Cendrawasih No. 2 Pekalongan

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Rencana Kerja	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	8
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	9
BAB III	11
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	11
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	14
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	24
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	25
BAB IV	27
PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan.....	27
4.2. Rekomendasi.....	27

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profile Responden

3.1.1. Pendidikan

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	frekuensi	%
1	SD Kebawah	3	6
2	SMP	5	10
3	SLTA	22	44
4	D-1,D-2,D-3	5	10
5	S-1	14	28
6	S-2	1	2
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 44 %

3.1.2. Pekerjaan

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 34 % responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan

No	Pekerjaan Utama	frekuensi	%
1	Kospin Jasa	1	2
2	TNI/Polri	3	6
3	PNS	5	10
4	Swasta	9	18
5	Wiraswasta	15	30
6	Lainnya	17	34
Jumlah		50	100

3.1.3. Usia

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 30 tahun.

Tabel 6.
Usia

No	Umur	frekuensi	%
1	18-30	19	38
2	31-40	16	32
3	41-50	8	16
4	51-60	5	10
5	60>	2	4
6	Tidak Mencantumkan usia	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel indek responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-30 tahun 38 %

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

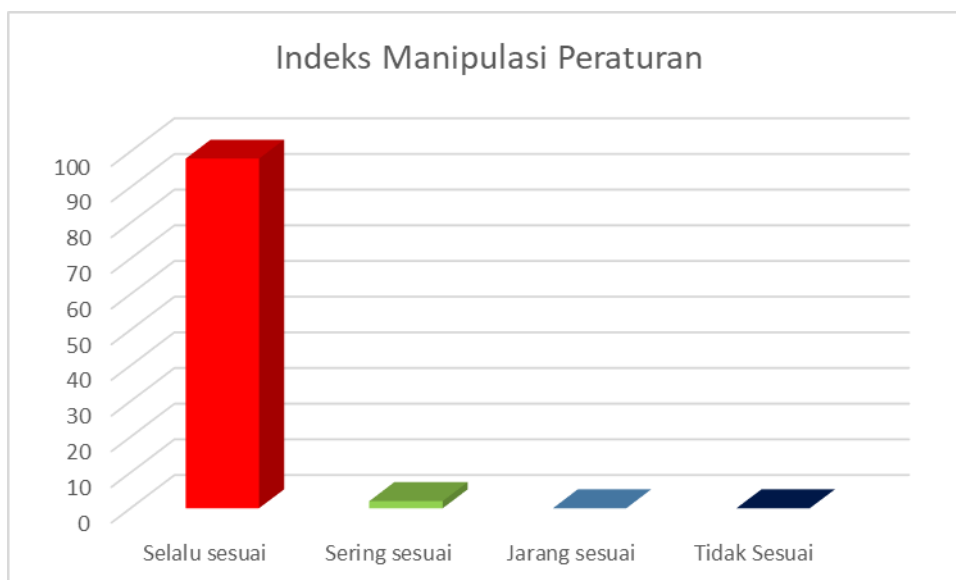
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,98

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari dari manipulasi prosedur

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Selalu sesuai	4	49	98
2	Sering sesuai	3	1	2
3	Jarang sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

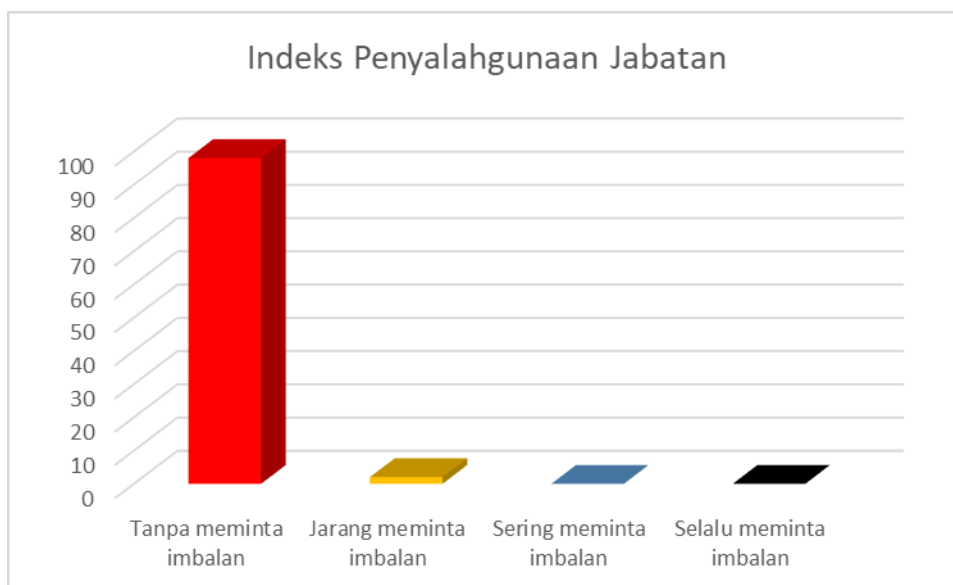
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,9 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tanpa meminta imbalan	4	49	98
2	Jarang meminta imbalan	3	1	2
3	Sering meminta imbalan	2	0	0
4	Selalu meminta imbalan	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,9 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	45	90
2	Jarang	3	2	4
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	3	6
Jumlah			50	100



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

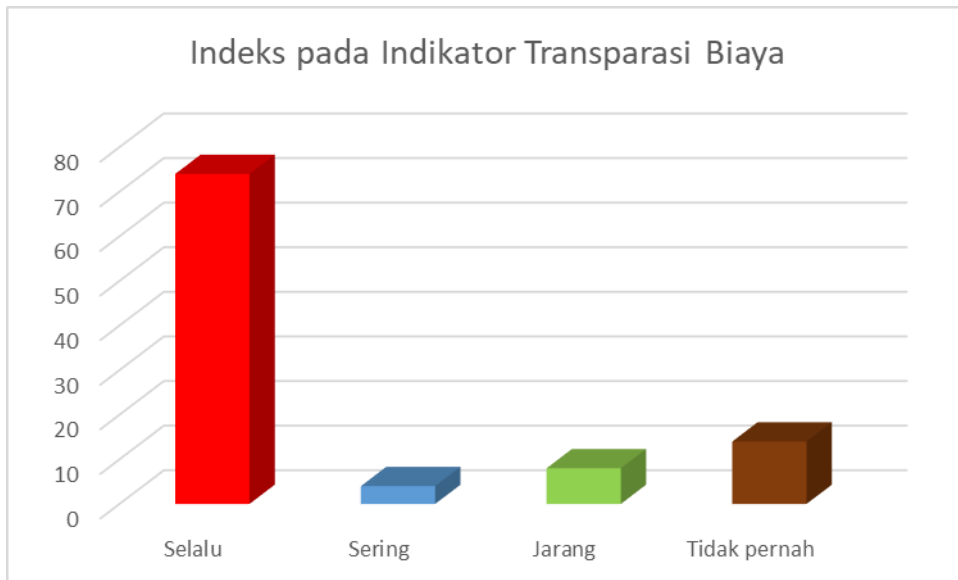
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,44 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia

Tabel 10.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	37	74
2	Sering	3	2	4
3	Jarang	2	4	8
4	Tidak pernah	1	7	14
Jumlah			50	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

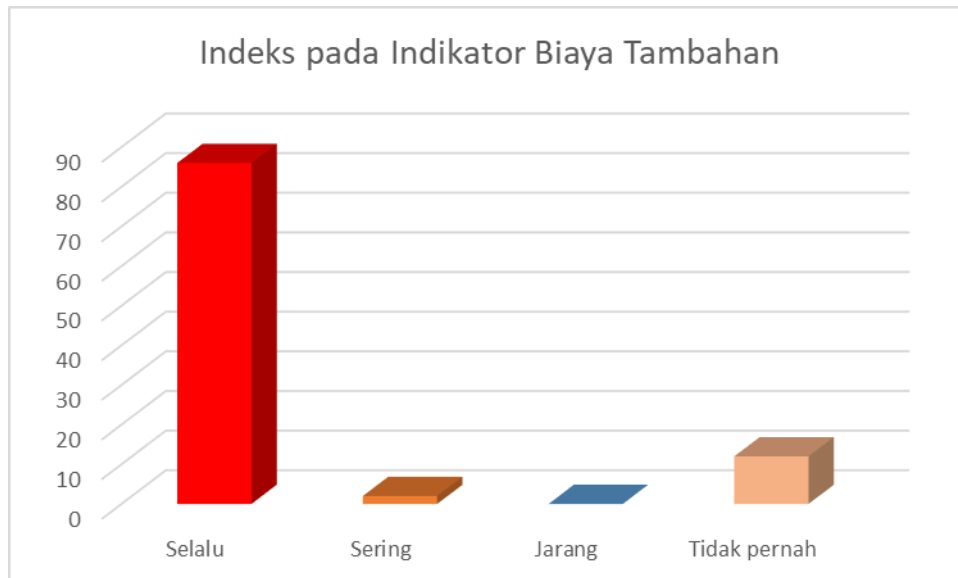
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,68 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia

Tabel 11.

Indeks pada Indikator Biaya tambahan

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	43	86
2	Sering	3	1	2
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak pernah	1	6	12
Jumlah			50	100



3.2.6. Indikator Hadiah

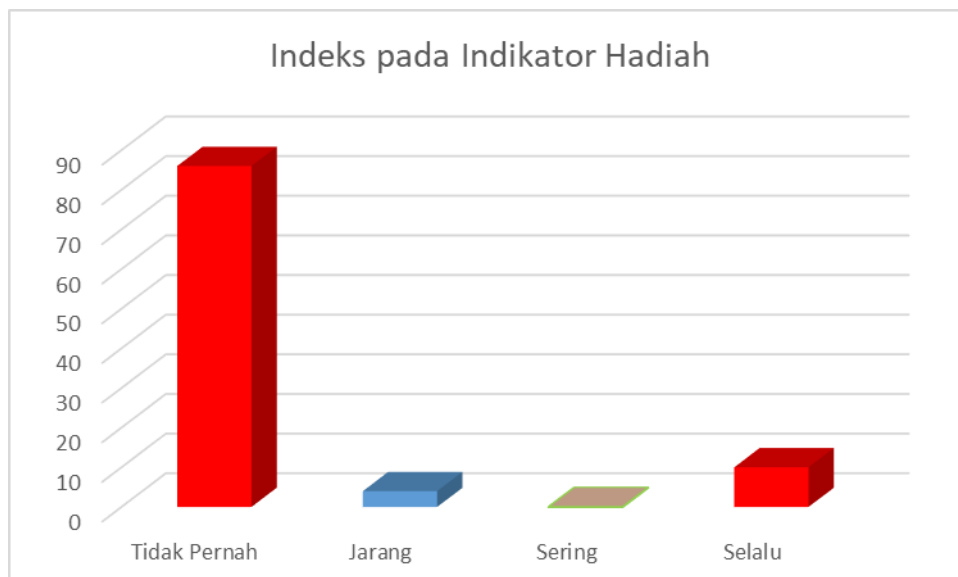
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,72 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak Pernah menerima hadiah dari pihak manapun

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	43	86
2	Jarang	3	2	4
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	5	10
Jumlah			50	100



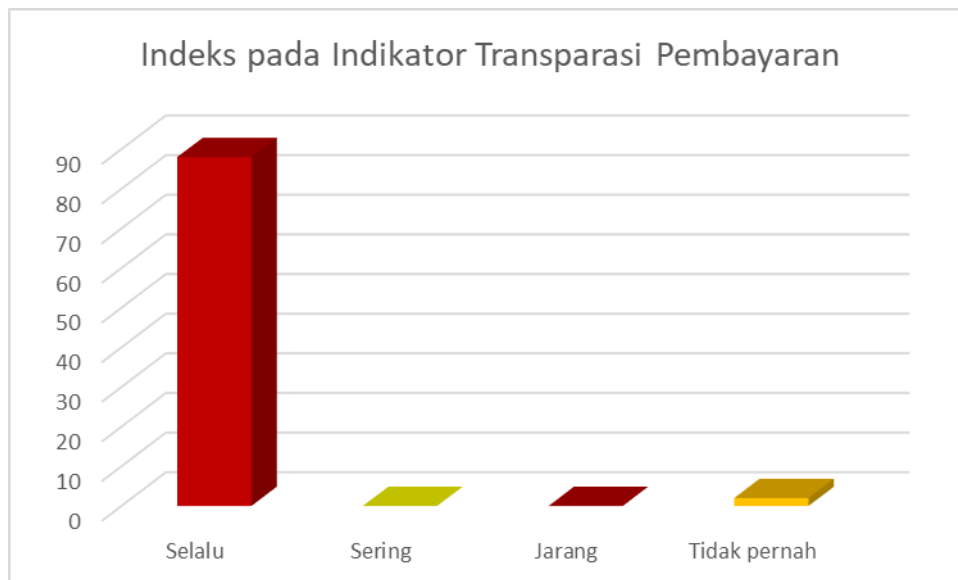
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,64 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	44	88
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak pernah	1	6	2
Jumlah			50	100



3.2.8. Indikator Percaloan

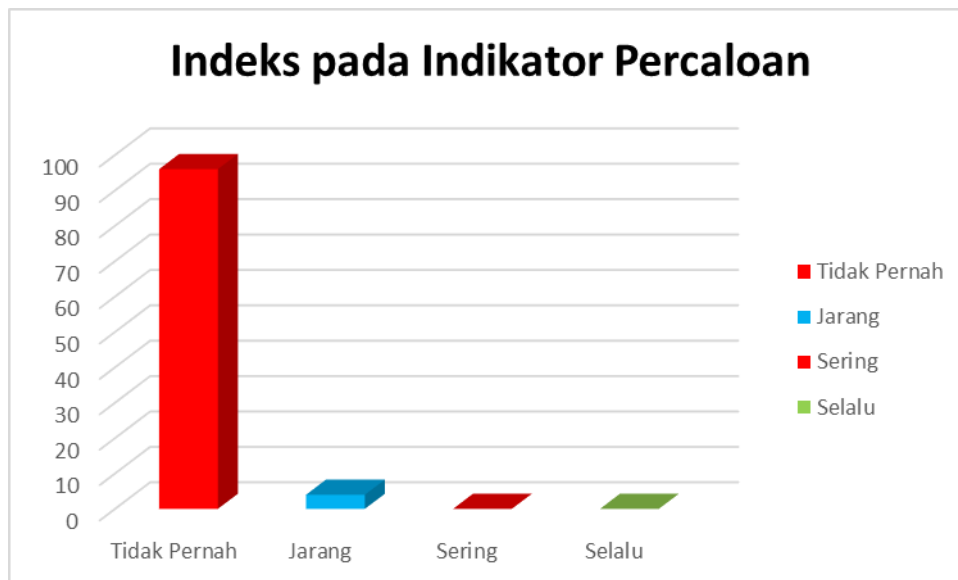
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,8 %

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	48	96
2	Jarang	3	2	4
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			50	100



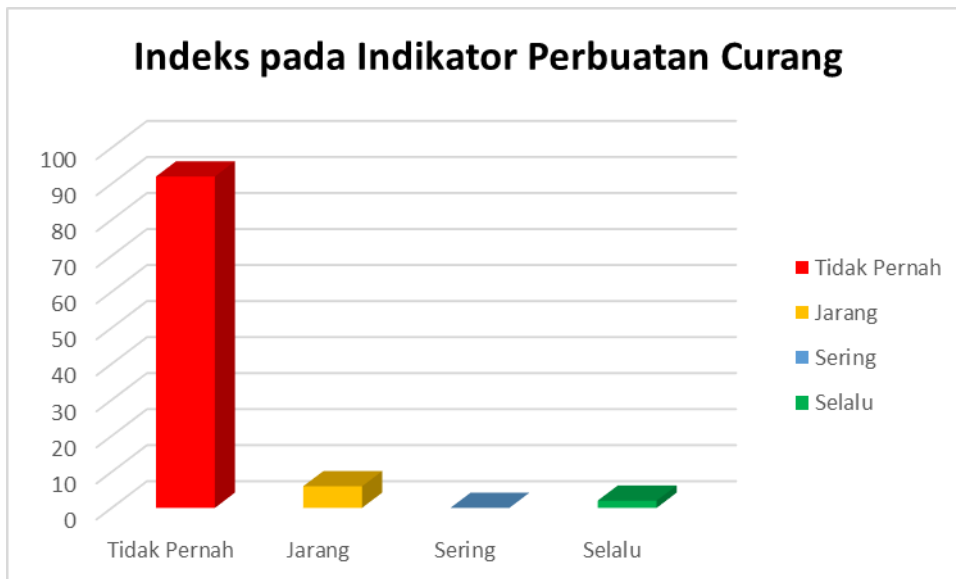
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,86 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	46	92
2	Jarang	3	3	6
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	1	2
Jumlah			50	100



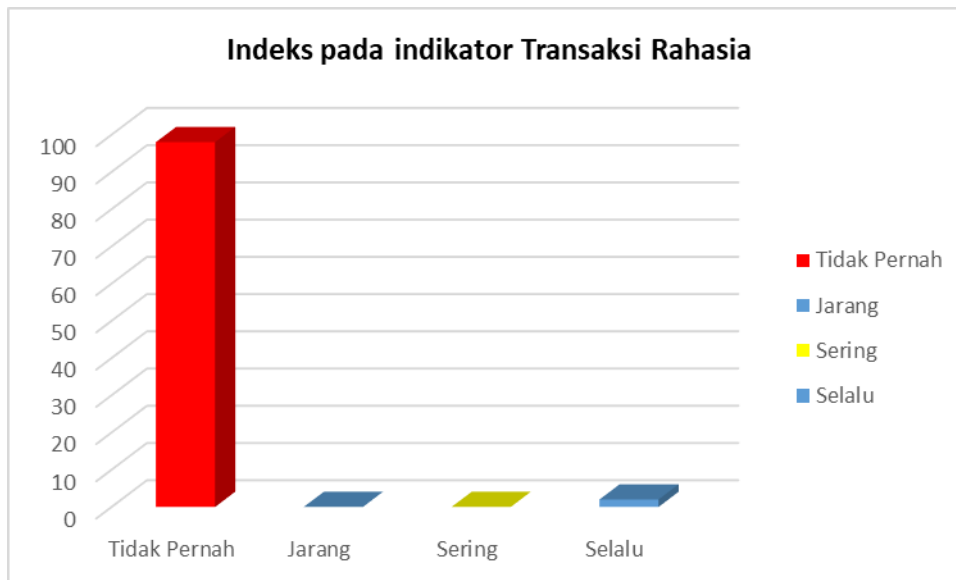
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.92 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

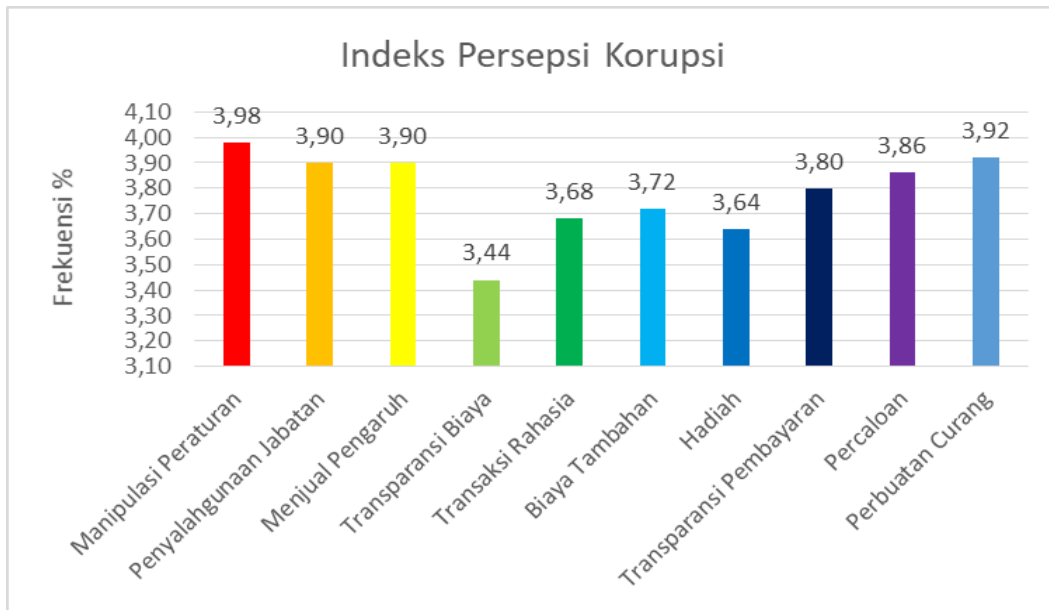
No	Jawaban	Skor	frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	49	98
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	1	2
Jumlah			50	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan sebesar 3,78 %

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pekalongan



Indeks 3,78 % tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 94,600

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pekalongan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	
2	
3	
4	
5	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pekalongan memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,78 **atau** masuk pada kategori 94,60 Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,9
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,9
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,44
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,68
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,72
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,64
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,8
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,86
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,92

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2019 bulan Januari s/d Februari tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,78 atau masuk pada persepsi 94,60 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transparansi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2019**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)

2. Instansi/Perusahaan :

3. Umur (Tahun) :

4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan

5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
 2. SD 6. Sarjana (S1)
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
 4. SLTA

5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
 2. TNI/Polri 6. Pedagang
 3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
 4. Wiraswasta 8. Lainnya.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.

2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN
(1)	(2)
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9. Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :



ANALISA DATA
KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah
 51116

Telp. (0285) 422102, Fax : (0285) 422288, Email :
 pn_pkl@yahoo.com

NOMOR URUT RESPO NDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN										Ket
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	3	3	3	4	1	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	
36	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4	
37	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	
38	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	

39	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	
41	4	4	4	1	1	3	4	4	4	4	
42	3	3	3	1	4	4	4	4	4	3	4
43	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4
50	4	0	4	4	4	4	4	3	4	4	4
N.Total	199	195	195	172	184	186	182	190	193	196	
IPK	3,98	3,9	3,9	3,44	3,68	3,72	3,64	3,8	3,86	3,92	3,78
Nilai Interval Konversi IPK											94,600
Kinerja											Bersih dari Korupsi

Nilai Persepsi IPK	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak Bersih Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang Bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi